

BAB II

Audit Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas

2.1. Audit

2.1.1. Definisi Audit

Secara umum pemeriksaan akuntan (auditing) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 1992; 7).

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Amir, 1991; 2).

Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association memberikan definisi audit sebagai

“suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antar asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”

2.1.2. Jenis-jenis audit

Tiga macam jenis audit, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Audit Kepatuhan

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan yang berlaku. Laporan audit kepatuhan pada umumnya ditujukan kepada otoritas yang menerbitkan kriteria tersebut dan dapat terdiri dari ringkasan temuan atau pernyataan keyakinan mengenai derajat kepatuhan dengan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional

Berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

Tabel 2-1
Ikhtisar Komparatif Jenis-Jenis Audit

Jenis Audit	Sifat Asersi	Kriteria yang Ditetapkan	Sifat Laporan Auditor
Laporan Keuangan	Data laporan keuangan	Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum	Pendapat atas kewajaran laporan keuangan
Kepatuhan	Klaim atau data berkenaan dengan kepatuhan kepada kebijakan, perundangan, peraturan dan sebagainya	Kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan lain pihak ketiga	Ringkasan temuan atau keyakinan tentang derajat kepatuhan
Operasional	Data operasional atau kinerja	Menetapkan tujuan, misalnya, yang dilakukan oleh manajemen atau pihak yang berwenang	Efisiensi dan efektivitas yang diamati; rekomendasi untuk peningkatan

2.1.3. Asersi-asersi Manajemen Dalam Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disajikan suatu organisasi telah disajikan secara wajar, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Agar dapat memenuhi tujuan tersebut maka perlu dilakukan analisis pada laporan keuangan berdasarkan asersi-asersi yang selalu melekat pada setiap informasi keuangan yang telah disajikan.

Asersi-asersi yang sama melandasi semua aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya komponen-komponen laporan keuangan. dalam PSA No. 07, bukti audit (SA 326.03), disebutkan lima golongan besar asersi-asersi laporan keuangan:

1. Keberadaan dan keterjadian (*existence or occurrence*).
2. Kelengkapan (*completeness*).
3. Hak dan kewajiban (*rights and obligations*).
4. Penilaian atau pengalokasian (*valuation or allocation*).

5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*).

Tabel 2-2
Asersi Manajemen

Kategori Asersi	Makna Asersi
Keberadaan dan Ketrejadian	Aktiva dan kewajiban entitas memang benar-benar ada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dicatat benar-benar telah terjadi selama periode tersebut.
Kelengkapan	Semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan benar-benar telah disajikan..
Hak dan Kewajiban	Aktiva telah menjadi hak entitas dan utang adalah hutang memang telah menjadi kewajiban entitas pada suatu tanggal tertentu.
Penilaian dan Pengalokasian	Komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat.
Penyajian dan Pengungkapan	Komponen-komponen tertentu laporan keuangan telah diklasifikasikan, diuraikan, dan diungkapkan dengan tepat.

(Boynton, 2002; 195)

2.1.4. Bukti Audit

Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 1992 ; 130). Contoh bukti audit dari masing-masing kategori dan jenis bahan bukti adalah (Boynton, 2002; 234):

Tabel 2-3
Bahan Bukti

Sifat Bahan Bukti	Standar Ketiga Pekerjaan Lapangan
Data akuntansi yang mendasar: <ul style="list-style-type: none"> • Buku-buku ayat jurnal awal • Buku besar dan buku pembantu • Pedoman akuntansi tersebut • Catatan informal dan memorandum, seperti kertas kerja, perhitungan, dan rekonsiliasi. 	Bahan Bukti Kompeten Yang Mencukupi

Tabel 2-3 Lanjutan

Sifat Bahan Bukti	Standar Ketiga Pekerjaan Lapangan
Informasi Penguat: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen-dokumen seperti cek, faktur, kontrak, dan notulen rapat. • Konfirmasi dan penyajian tertulis lainnya • Informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. • Informasi lain yang diperoleh atau dikembangkan oleh auditor. 	Bahan Bukti Kompeten Yang Mencukupi

Sumber: AU.326.14-16, diambil dari Boynton, 2002; 234.

2.1.5. Prosedur-Prosedur audit

Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Berikut ini adalah sepuluh macam prosedur audit yang biasa dilakukan auditor, yaitu (Boynton, 2002; 237):

1. Prosedur analitis (*Analytical Procedures*)

Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan diantara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi

2. Menginspeksi (*Inspecting*)

Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumberdaya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Memeriksa sumberdaya berwujud memungkinkan auditor dapat mengetahui secara langsung keberadaan dan kondisi fisik

sumberdaya tersebut. Dengan demikian, inspeksi juga memberikan cara untuk mengevaluasi bukti fisik.

3. Konfirmasi (*Confirming*)

Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen diluar organisasi klien.

4. Permintaan keterangan (*Inquiring*)

Permintaan keterangan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Pertanyaan yang telah disusun diajukan kepada pihak-pihak intern organisasi.

5. Penghitungan (*Counting*)

Pada umumnya prosedur menghitung yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan fisik atas barang-barang berwujud, seperti melakukan perhitungan kas atau persediaan yang ada di organisasi dan menghitung dokumen-dokumen yang tersedia.

6. Penelusuran (*Tracing*)

Dalam penelusuran yang seringkali juga disebut sebagai penelusuran ulang, auditor (1) memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan (2) menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi. Prosedur ini merupakan prosedur yang paling penting dalam memperoleh bukti yang berkaitan dengan asersi kelengkapan.

7. Pemeriksaan bukti pendukung (*Vouching*)

Pemeriksaan bukti pendukung meliputi (1) pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan (2) mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Prosedur ini merupakan prosedur yang paling penting untuk memperoleh bukti yang berkaitan dengan asersi keberadaan atau keterjadian.

8. Pengamatan (*Observing*)

Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas. Pengamatan terutama penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal.

9. Pelaksanaan ulang (*Reforming*)

Prosedur ini dilakukan dengan cara melakukan penghitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien. Contohnya: menghitung ulang total jumlah rupiah dalam jurnal. Auditor juga dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang telah dirumuskan.

10. Teknik audit berbantuan komputer (*Computer-assisted audit techniques*)

Bila catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik maka auditor perlu menggunakan *computer-assisted audit techniques* untuk

membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya.

2.2. Struktur Pengendalian Intern

2.2.1. Definisi Pengendalian Intern

Standar pekerjaan lapangan kedua dalam standar auditing menyatakan bahwa “pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”. Pemahaman ini akan diawali dengan mengetahui definisi pengendalian intern.

Laporan COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut (Boynton, 2002, 373):

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Definisi pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut:

1. Pengendalian intern adalah sebuah proses. Ini berarti bahwa pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur entitas.

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan biaya dan manfaat dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, operasi.

Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggungjawab auditor dalam memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan diatas, hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama – keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

2.2.2. Komponen Pengendalian Intern

Laporan COSO menyatakan adanya lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan, yaitu (Boynton, 2002, 379):

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.

Berbagai faktor yang membentuk lingkaran pengendalian dalam suatu entitas antara lain:

a. Integritas dan nilai-nilai etika

Efektivitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c. Dewan komisaris dan komite audit

Komposisi dewan komisaris dan komite audit serta cara bagaimana mereka melakukan tanggung jawab pengawasan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian.

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Sedangkan gaya operasi menentukan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan.

e. Struktur organisasi

Pengembangan struktur organisasi untuk suatu organisasi menyangkut perumusan kewenangan dan tanggung jawab serta alur pelaporan yang dituangkan dalam bentuk bagan organisasi. Pemahaman hubungan tersebut diperlukan untuk menilai lingkungan pengendalian organisasi dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian.

f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab

Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Efektif tidaknya pengendalian intern tergantung pada kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia yang dianut. Hal ini akan menentukan apakah setiap karyawan memiliki integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan, desain, dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

3. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metoda dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi (termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi) dan menyelenggarakan pertanggung jawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Pemisahan tugas

Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak melakukan perangkapan tugas yang tidak boleh dirangkap.

b. Pengendalian pemrosesan informasi

1) Pengendalian umum. Meliputi pengorganisasian pusat data, perangkat keras dan penerapan sistem perangkat lunak beserta pemeliharaannya, termasuk juga proses *back up*.

2) Pengendalian aplikasi; otorisasi memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai, dan pengecekan secara independen.

3) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kerugian sebagai akibat kerusakan atau hilangnya kekayaan dan catatan.

4) *Review* atas kinerja. Dengan menghubungkan data menurut laporan dengan harapan manajemen sendiri, maka manajemen akan dapat mendeteksi tempat yang memiliki resiko tinggi salah saji.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.2.3. Keterbatasan Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern memiliki keterbatasan bawaan, oleh karena itu pengendalian intern hanya memberikan suatu keyakinan yang memadai bagi berbagai pihak yang saling terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap struktur pengendalian intern (Boynton, 2002; 375):

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan dalam organisasi yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lain.
2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya

pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau keputusan semu.
5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Namun pengurangan biaya dan manfaat sulit dilakukan dengan tepat. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi hubungan biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.2.4. Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman Pengendalian Intern

Dalam memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian yang relevan dengan perencanaan audit, auditor harus melaksanakan prosedur untuk menyediakan pengetahuan yang cukup mengenai rancangan pengendalian yang relevan berkenaan dengan kelima komponen pengendalian intern dan apakah hal itu telah ditempatkan dalam operasi, prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern ini terdiri dari (Boynton, 2002; 410):

1. *Review* pengalaman masa lalu klien.
2. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas dan staf personel yang tepat.

3. Memeriksa dokumen dan catatan.
4. Mengamati aktivitas dan operasi entitas.

2.2.5. Mendokumentasikan Pemahaman Pengendalian Intern

Mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian intern diperlukan dalam semua audit. Bentuk dan luas pendokumentasian dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, dan sifat dari pengendalian intern entitas. Pendokumentasian dalam kertas kerja dapat berupa (Boynton, 2002; 412):

1. Kuesioner

Terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai pengendalian intern yang perlu dipertimbangkan auditor untuk mencegah salah saji yang material dalam laporan keuangan. Pertanyaan biasanya dibuat dalam bentuk jawaban *Ya* atau *Tidak* atau *N/A (not applicable)*.

2. Bagan arus

Adalah suatu diagram skematik dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi, garis arus yang selalu berhubungan, dan keterangan yang menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam memproses informasi melalui sistem akuntansi.

3. Tabel keputusan

Adalah sebuah matriks yang digunakan untuk mendokumentasikan logika dari suatu program komputer. Tabel keputusan biasanya mempunyai tiga komponen penting, yaitu: (1) kondisi yang berhubungan dengan transaksi akuntansi, (2) tindakan yang diambil oleh program komputer, dan (3)

peraturan keputusan yang digunakan untuk mengatasi kondisi dengan tindakan selanjutnya. Kondisi yang dimasukkan dalam tabel keputusan biasanya mewakili kondisi yang berhubungan dengan prosedur pengendalian relevan dengan audit.

4. Memorandum naratif

Terdiri dari komentar-komentar tertulis berkenaan dengan pertimbangan auditor atas pengendalian intern. Memorandum dapat digunakan untuk melengkapi bagan arus atau bentuk pendokumentasian lain dengan meringkas keseluruhan pemahaman auditor mengenai pengendalian intern, komponen individu dari pengendalian intern, atau kebijakan atau prosedur spesifik.

2.2.6. Memahami Komponen Pengendalian Intern

1. Memahami Lingkungan Pengendalian

Informasi tentang lingkungan pengendalian pada umumnya tidak didukung dengan dokumen memadai. Informasi mengenai lingkungan pengendalian umumnya dikumpulkan oleh auditor dengan cara permintaan keterangan dari manajer yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian, inspeksi dokumen dan catatan, dan pengamatan atas kegiatan perusahaan

2. Memahami penilaian resiko

Auditor harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar, dan kepedulian manajemen terhadap resiko

tersebut, serta bagaimana manajemen merancang aktivitas pengendalian untuk mengatasi resiko tersebut. Auditor juga harus mengumpulkan informasi tentang respon manajemen terhadap perubahan keadaan, baik intern maupun ekstern, dan pengaruhnya terhadap resiko pengendalian.

3. Memahami Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi entitas sangat menentukan resiko salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi yang didesain baik dan diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi akuntansi yang andal. Adapun informasi yang harus dikumpulkan oleh auditor untuk memahami sistem akuntansi klien adalah sebagai berikut:

- a. Golongan utama transaksi dalam kegiatan perusahaan.
- b. Bagaimana transaksi itu timbul dan dilaksanakan.
- c. Catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan akun-akun yang terkait dalam laporan keuangan yang bersangkutan dengan pengolahan dan pelaporan transaksi.
- d. Proses pengolahan data akuntansi yang dilakukan sejak saat transaksi sampai disajikan dalam laporan keuangan, termasuk bagaimana komputer digunakan untuk mengolah data tersebut.
- e. Proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas, termasuk penaksiran akuntansi penting yang digunakan oleh manajemen.

4. Memahami Aktivitas Pengendalian

Informasi tentang aktivitas pengendalian umumnya diperoleh oleh auditor bersamaan dengan pengumpulan informasi mengenai lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Sebagai contoh, pada saat auditor mengumpulkan informasi mengenai struktur organisasi yang bersangkutan dengan transaksi pembelian, auditor akan mengumpulkan sekaligus bagaimana transaksi pembelian timbul dan manajer yang memberikan otorisasi atas terjadinya transaksi tersebut.

5. Memahami Pemantauan

Auditor harus memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh klien untuk memantau efektivitas pengendalian intern untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai. Auditor harus pula memahami tindakan-tindakan yang diambil untuk memperbaiki unsur pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pemantauan. Informasi hasil pemantauan yang dilakukan auditor intern dan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengatasi masalah pengendalian yang ditemukan oleh auditor intern sangat bermanfaat bagi auditor independen.

(Boynton, 2002; 407)

2.3. Pengendalian Intern Penerimaan Kas

2.3.1. Definisi Penerimaan Kas

Penerimaan kas merupakan hasil dari beberapa aktivitas. Sebagai contoh penerimaan kas yang terjadi di Gereja Kumetiran antara lain kas diterima dari

transaksi pendapatan, kolekte, sumbangan devosionalia, adorasi, teks misa, kotak kaca / pembangunan, sumbangan bulanan dana umat, karya kasih, sumbangan pemakaian Gereja dan sumbangan perkawinan, sumbangan paramenta, sumbangan pengganti buku rohani / toko, dan sumbangan pemakaian wisma paroki.

Risiko utama dalam memproses transaksi penerimaan kas adalah kemungkinan pencurian kas sebelum atau sesudah catatan penerimaan dibuat. Dengan demikian, prosedur pengendalian harus memberikan kepastian yang layak bahwa dokumentasi penetapan tanggung jawab telah dibuat pada saat kas diterima dan bahwa kas telah disimpan ditempat yang aman. Risiko kedua adalah kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemrosesan berikutnya.

Pengendalian fisik yang tepat atas kas mengisyaratkan bahwa seluruh penerimaan kas disetorkan secara utuh setiap hari (*deposited infact daily*). Kata utuh berarti seluruh penerimaan harus disetorkan; yaitu, pengeluaran kas tidak boleh dilakukan dengan penerimaan yang belum disetorkan. Pengendalian ini mengurangi resiko bahwa penerimaan tidak akan dicatat, dan menghasilkan catatan setoran bank yang mendapatkan eksistensi dan kejadian transaksi.

2.3.2. Sistem Penerimaan Kas di Gereja Kumetiran

Siklus transaksi merupakan hal yang sangat penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Transaksi penerimaan kas termasuk di dalam siklus pendapatan. Penerimaan kas merupakan hasil dari beberapa aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi.

Transaksi-transaksi penerimaan kas yang terjadi di Gereja Kumetiran, yaitu:

1. Kolekte, Sumbangan Devosionalia / Adorasi, Teks misa, Kotak kaca / Pembangunan.

Rekening / pos penerimaan kolekte dan persembahan untuk mencatat penerimaan kolekte dan persembahan dari umat. Penerimaan Devosionalia yaitu penerimaan yang berasal dari devosi umat.

2. Sumbangan Bulanan Dana Umat, Karya Kasih.

Rekening / pos sumbangan bulanan umat ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan hasil kolekte misa mingguan dan persembahan bulanan umat, yang dicatat sebesar 100%.

3. Sumbangan pemakaian Gereja dan Sumbangan Perkawinan.

Rekening / pos sumbangan pemakaian Gereja ini digunakan untuk mencatat sumbangan dari umat yang menggunakan gedung Gereja untuk misa / ibadat, sedangkan rekening / pos sumbangan perkawinan digunakan untuk mencatat sumbangan dari umat yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Sumbangan Paramenta

Rekening / pos ini digunakan untuk mencatat sumbangan dari umat yang meminjam peralatan paramenta.

5. Sumbangan Pemakaian Wisma Paroki

Rekening / pos pemakaian wisma Paroki ini digunakan untuk mencatat sumbangan dari umat yang menggunakan gedung Wisma Paroki.

6. Sumbangan Pengganti Buku Rohani / Toko Devosionalia atau penerimaan lainnya.

7. Sumbangan Parkir

Rekening / pos sumbangan parkir ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan hasil parkir pada setiap kegiatan.

2.4. Sampling Audit Dalam Pengujian Pengendalian

2.4.1. Konsep Dasar Sampling Audit

AU 350.01 mendefinisikan sampling audit (*audit sampling*) sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ketidakpastian yang melekat dalam audit sering disebut sebagai resiko audit. Sampling audit menerapkan dua komponen resiko audit, yaitu resiko pengendalian (*control risk*) dan pengujian rincian resiko. Resiko pengendalian adalah resiko bahwa pengendalian intern tidak dapat mendeteksi atau menghindari salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Pengujian rincian resiko merupakan resiko bahwa salah saji material tidak akan diungkapkan dengan pengujian rincian oleh auditor.

Dalam melaksanakan pengujian audit sesuai dengan standar audit, auditor bisa menggunakan *sampling non statistical*, *sampling statistical*, atau keduanya. Kedua tipe sampling tersebut memerlukan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan serta penilaian hasilnya.

1. Sampling Non-Statistik (*Non-Statistical sampling*)

Langkah-langkah dalam rencana sampling non-statsistik untuk pengujian pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan audit dan prosedur untuk memenuhi tujuan tersebut.
- b. Menentukan populasi dan unit sampling.
- c. Menspesifikasi pengendalian yang dikehendaki dan bukti bahwa pengendalian tersebut efektif atau tidak efektif.
- d. Menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan ukuran sampel.
- e. Menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan metode pemilihan sampel.
- f. Menerapkan prosedur audit untuk pengujian pengendalian.
- g. Mengevaluasi hasil sampel.

2. Sampling Statistik (*Statistical Sampling*)

Stastical sampling dibagi menjadi dua: *attribute sampling* dan *variable sampling*. *Attribute sampling* atau disebut pula *proportional sampling* digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern (dalam pengujian pengendalian). *Variable sampling* digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun (dalam pengujian substantif).

Sampling statistik menguntungkan auditor dalam:

- a. Perancangan sampel yang efisien.
- b. Mengukur kecukupan bukti yang diperoleh.
- c. Mengevaluasi hasil sampel.

Langkah-langkah dalam rencana sampling statistik untuk pengujian pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan audit.
- b. Menentukan populasi dan unit sampling.
- c. Menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki.
- d. Menentukan ukuran sampel.
- e. Menentukan metode pemilihan sampel.
- f. Melaksanakan rencana sampling.
- g. Mengevaluasi hasil sampel.

2.4.2. Model-Model Attribute Sampling

Statistik sampling dibagi menjadi dua yaitu *attribute sampling* dan *variable sampling*. *Attribute sampling* digunakan dalam pengujian pengendalian dan bertujuan untuk menaksir tingkat deviasi dari pengendalian yang telah ditetapkan dalam suatu populasi, sedangkan *variable sampling* digunakan untuk pengujian substantif dan bertujuan untuk menaksir jumlah total rupiah suatu populasi atau jumlah rupiah kekeliruan dalam suatu populasi.

Attribute sampling terdiri dari tiga model (Mulyadi, 1992; 162)

1. *Fixed-sample-size attribute sampling*

Ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Model ini biasanya digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan.

Prosedur pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan *attribute* yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern.
- b. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.
- c. Penentuan besarnya sampel.
- d. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.
- e. Pemeriksaan terhadap *attribute* yang menunjukkan efektifitas unsur pengendalian intern.
- f. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap *attribute* anggota sampel.

2. *Stop-or-go sampling*

Stop-or-go sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan *stop-or-go sampling* adalah:

- a. Tentukan *desired upper precission limit* dan tingkat keandalan.

Pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima. Tabel yang tersedia dalam *stop-or-go sampling* ini menyarankan auditor untuk memilih tingkat kepercayaan 90%, 95%, atau 99%.

- b. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil.

Setelah tingkat keandalan dan *desired upper precision limit* (DUPL) ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan bantuan Tabel Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian Pengendalian. Auditor disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan menggunakan *desired upper precision limit* lebih dari 5%. Dengan demikian pada umumnya dalam pengujian pengendalian, auditor tidak pernah memilih besarnya sampel kurang dari 60 sampel.

Contoh:

Auditor memilih tingkat keandalan 95% dan DUPL 5%. Auditor menentukan besarnya sampel minimum. Maka sampel yang harus diambil adalah sebagai berikut:

Tabel 2-4
Cara Pencarian Besarnya Sampel Minimum untuk Pengujian
Kepatuhan

Tabel Besarnya Sampel Minimum Untuk Pengujian Kepatuhan			
Desired Upper Precision Limit	Besarnya Sampel atas Dasar Pengujian Kepatuhan		
	90%	95%	97,5%
10%			
9			
8			
7			
6			
5		60	
4			
3			
2			
1			

c. Buatlah *table stop-or-decision*.

Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan *stop-or-go*. Umumnya, dalam merancang tabel *stop-or-go decision*, auditor jarang merencanakan pengambilan sampel lebih dari 3 kali.

Tabel 2-5
Tabel *Stop-or-Go Decision*

Langkah ke-	Besarnya sampel kumulatif yang digunakan	Berhenti jika kesalahan kumulatif yang terjadi sama dengan	Lanjut ke langkah berikutnya jika kesalahan yang terjadi sama dengan	Lanjut ke langkah 5 jika kesalahan yang terjadi paling tidak sebesar
1	60	0	1	4
2	96	1	2	4
3	126	2	3	4
4	156	3	4	4
5	Gunakan <i>fixed sample-size-attribute sampling</i>			

Berikut ini diuraikan cara penyusunan tabel *stop-or-go decision* seperti yang tercantum pada tabel di atas:

Jika pada pemeriksaan 60 anggota sampel tersebut, auditor tidak menemukan kesalahan maka auditor akan menghentikan pengambilan sampel, dan mengambil kesimpulan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika $DUPL = AUPL$. Pada tingkat kesalahan sama dengan 0, AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AUPL = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliability for occurrence observed}}{\text{Sample size}}$$

Menurut tabel 2.2 *confidence level factor* pada $R=95\%$ pada tingkat kesalahan yang sama dengan 0 adalah 3, $AUPL = 3 \div 60 = 5\%$. Maka pada tingkat kesalahan 0, unsur pengendalian intern klien adalah baik, karena AUPL tidak melebihi DUPL.

Jika kesalahan yang dijumpai sama dengan 1, maka *confidence level factor* pada $R=95\%$ adalah 4,8 (lihat tabel). Dengan demikian, $AUPL = 4,8 \div 60 = 8\%$. Oleh karena itu, auditor membutuhkan sampel tambahan, dengan cara:

$$\text{Sample size} = \frac{\text{Confidence level factor at desired reliability for accuracy observed}}{\text{Desired upper precision limit (DUPL)}}$$

Dalam contoh di atas, maka besarnya sampel dihitung sebesar $4,8 \div 5\% = 96$. Besarnya sampel ini kemudian digunakan pada langkah kedua. Langkah ini terus dilakukan hingga langkah keempat.

Jika pada langkah keempat, auditor akan menggunakan 156 anggota sampel dan menemukan 4 kesalahan, maka AUPL sebesar 5,9% ($9,2 \div 156$). Dalam keadaan ini, auditor akan mengambil kesimpulan bahwa unsur pengendalian intern yang diperiksa tidak dapat dipercaya atau auditor dapat menggunakan *fixed sample-size-attribute sampling* sebagai alternatif.

Tabel 2-6
Tabel Pencarian *Confidence Level Factor*

Number of Occurrence	Confidence Levels		
	90%	95%	97,5%
0	→ 3,0		
1			
2			
3			
4			

d. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

AUPL kemudian dibandingkan dengan DUPL. Jika $AUPL \leq DUPL$, pengendalian dinilai efektif. Sebaliknya, jika $AUPL > DUPL$ maka pengendalian dinilai tidak efektif.

3. *Discovery Sampling*

Model ini tepat digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). Model ini dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur

pengendalian intern, dan ketidakberesan yang lain. Prosedur pengambilan sampel dalam *discovery sampling* adalah sebagai berikut:

- a. Tentukan *attribute* yang akan diperiksa.
- b. Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya.
- c. Tentukan tingkat keandalan.
- d. Tentukan desired *upper precision limit*.
- e. Tentukan besarnya sampel.
- f. Periksa *attribite sample*.
- g. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel.

